

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Timur dalam dekade terakhir menjadi salah satu titik panas geopolitik dengan tingkat ketegangan tertinggi di dunia. Kawasan ini meliputi negara-negara utama seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, dan Korea Utara, yang masing-masing memiliki pengaruh besar baik dari segi ekonomi maupun militer (Syahrin, 2019). Dinamika keamanan regional di kawasan ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kekuatan besar dan negara-negara setempat. Rivalitas ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin telah memicu konflik di Asia Timur. Meski Perang Dingin telah berakhir, ancaman dan ketegangan keamanan tetap berlangsung. Saat ini, politik kawasan berkembang lebih beragam karena adanya upaya membangun hubungan multilateral untuk meredakan konflik, sementara keterlibatan negara adidaya turut membentuk persepsi ancaman dan pola keamanan antarnegara (Buzan, 2003).

Kompleksitas keamanan Asia Timur semakin diperkuat oleh isu-isu krusial, seperti normalisasi hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, serta persoalan Taiwan (Mas'ood, 2004). Dalam hal ini, Semenanjung Korea menjadi titik strategis karena menjadi pusat pertemuan kepentingan geopolitik Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Secara geografis, Korea Utara memiliki posisi penting sebagai poros interaksi negara-negara besar di kawasan. Selain itu, aliansi Jepang dengan Amerika Serikat serta meningkatnya kekuatan militer Cina semakin memperumit dinamika keamanan. Kondisi ini mendorong negara-negara Asia Timur lebih waspada terhadap potensi ancaman dan mencari langkah antisipatif, di tengah ketegangan yang terus berlangsung antara Korea Utara dan Korea Selatan (Parwita, 2025).

Isu lain yang turut memengaruhi stabilitas kawasan adalah hubungan Tiongkok dan Taiwan. Secara historis, Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, pengalaman disintegrasi membuat sebagian masyarakat Taiwan menolak identitas tersebut. Situasi ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat sejak 1950-an dengan melakukan intervensi, sehingga Taiwan menjadi arena perebutan pengaruh antara Tiongkok dan AS (Mubah, 2014).

Beberapa tahun terakhir, Tiongkok memang gencar mengubah status quo di Selat Taiwan secara sepihak melalui tekanan militer, taktik zona *greyzone* dan membatasi ruang diplomasi Taiwan. Langkah ini mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan, sekaligus mengancam keamanan serta kesejahteraan regional. Stabilitas Selat Taiwan tidak hanya krusial bagi Indo-Pasifik, tetapi juga bagi ekonomi global karena Taiwan menjadi pusat utama rantai pasok semikonduktor. Apabila konflik tersebut berlangsung di Selat Taiwan, dampaknya akan melumpuhkan jalur transportasi laut dan udara, mengganggu perdagangan internasional, serta menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian global (Taipei Economic & Trade Office, 2024). Di sisi lain, dinamika kawasan juga dipengaruhi oleh meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok serta peran aktifnya dalam organisasi internasional dan kerja sama multilateral. Beberapa tahun kedepan, hubungan antarnegara di Asia Timur sangat mungkin ditentukan oleh bagaimana negara-negara lain merespons kebijakan luar negeri Tiongkok sebagai kekuatan global baru (Shambaugh, 2005).

Dalam konteks ini, persoalan Tiongkok dengan Taiwan tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembentukan identitas politik Tiongkok modern. Sebelum terbentuknya identitas Tiongkok seperti saat ini, wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Dinasti Qing yang menganut sistem monarki hingga 1912 (Cucchisi, 2002). Kejatuhan Dinasti Qing dipicu oleh Revolusi 1911 yang digagas Sun Yat-sen dengan tujuan mengakhiri pemerintahan kerajaan dan mendirikan Republik Cina (ROC) serta menciptakan sistem pemerintahan parlemen. Sun Yat-sen mengusung konsep “Tongkok Baru” yang berlandaskan tiga prinsip utama: nasionalisme, demokrasi, dan kehendak rakyat, serta membentuk Partai Kuomintang (KMT) untuk mewujudkan visi tersebut (Cucchisi, 2002).

Setelah Sun Yat-sen meninggal pada 1925, kepemimpinan dilanjutkan oleh Jenderal Chiang Kai-shek yang memiliki kekuatan militer sebagai modal politik (Cucchisi, 2002). Meskipun berhasil menaklukkan sebagian panglima perang sisa Dinasti Qing, ancaman tetap muncul, terutama dari Partai Komunis Cina (CCP) yang dipimpin Mao Zedong. Awalnya, CCP dan KMT sempat bekerja sama karena kebijakan Sun Yat-sen yang menerima bantuan dengan syarat membentuk front persatuan melawan panglima perang. Namun, hubungan ini berakhir ketika CCP

semakin kuat dan melancarkan pemberontakan, memicu perang saudara yang berlarut-larut.

Perang ini melahirkan dualisme identitas antara Tiongkok dan Taiwan. Pada 1949, CCP mendirikan People's Republic of China (PRC) dan mengklaim kedaulatan atas Taiwan, meskipun wilayah tersebut telah dikuasai ROC sejak 1945. Dalam politik internasional, posisi Taiwan melemah karena argumen hukum terkait kepemilikan historis, Perjanjian Shimonoseki, dan Deklarasi Kairo dianggap tidak mengikat secara hukum. Meski demikian, Taiwan tetap dipandang sebagai negara secara *de facto* dengan dukungan kekuatan revisionis (Ross, 2006).

Dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan semakin meningkatkan ketegangan dengan Tiongkok. Minimnya kontak diplomatik dan ketidakstabilan menjadi ciri hubungan kedua pihak. Walaupun terdapat upaya pemulihan melalui kerja sama ekonomi sejak Taiwan membuka akses bagi warganya untuk mengunjungi daratan pada 1987, ketegangan tetap berlanjut. Perdagangan lintas selat memang meningkat, dari 460 juta dolar AS pada 1981 menjadi 32 miliar dolar AS pada 2001 (Chao, 2013), tetapi perkembangan ini tidak mampu menghapus perbedaan mendasar terkait kedaulatan.

Ketegangan kembali menguat seiring kebijakan Tiongkok yang menegaskan klaim kedaulatan melalui "Satu Tiongkok". Kebijakan ini menjadi landasan utama diplomasi Tiongkok serta simbol identitas nasional yang berlaku global. Meskipun tidak bersifat konvensional, kebijakan ini mengatur negara-negara yang ingin melakukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan Taiwan, hal inilah yang menempatkan Taiwan dalam posisi tertekan. Hal ini memicu kekhawatiran akan potensi konflik bersenjata di Selat Taiwan. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut memperkuat pengaruh Tiongkok di kawasan dan komunitas internasional, sekaligus membuka peluang integrasi Taiwan tanpa penggunaan kekuatan militer (Herindrasti, 2020).

Melalui penerapan "Satu Tiongkok" hubungan diplomatik negara-negara Pasifik Selatan dengan Taiwan menjadi terhenti, yang berimplikasi pada hilangnya pengakuan terhadap kedaulatan Taiwan. Keberhasilan kebijakan ini disebabkan oleh pendekatan persuasif Tiongkok yang dinilai tidak terlalu mencampuri urusan domestik negara-negara di kawasan tersebut, serta kemampuannya memberikan

bantuan ekonomi lebih cepat dibandingkan Australia. Penerapan “Satu Tiongkok” mencerminkan kesungguhan Tiongkok dalam mewujudkan ambisinya menjadi kekuatan global. Esensi kebijakan ini adalah menegaskan bahwa tidak ada entitas lain selain Tiongkok yang dapat menjalin kerja sama internasional, sehingga Taiwan, Hong Kong, dan Macau diupayakan untuk tidak melakukan kemitraan dengan negara mana pun. Langkah ini menjadi strategi penting dalam memperlancar tujuan Tiongkok untuk melemahkan dominasi Amerika Serikat di Pasifik Selatan (Furqan, 2025).

Perubahan hubungan antara Taiwan, Amerika Serikat, dan Tiongkok pada tahun 2016 menjadi titik balik yang menimbulkan kekhawatiran serius. Kemenangan Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) atas Eric Chu dari Partai Kuomintang (KMT) dianggap sebagai kemunduran bagi upaya reunifikasi damai yang selama ini diupayakan Tiongkok (Taiwan Today, 2016). DPP, yang dikenal berhaluan pro-kemerdekaan, dinilai Tiongkok memanfaatkan sentimen anti-Tiongkok dan ketakutan masyarakat terhadap ketergantungan ekonomi pada daratan untuk memperoleh dukungan politik. Sebagai presiden perempuan pertama Taiwan, Tsai menolak untuk mengakui prinsip “Satu Tiongkok” yang menjadi dasar hubungan lintas selat (Ramzy, 2016). Langkah ini dipandang Tiongkok sebagai pelanggaran terhadap konsensus politik yang telah disepakati pada era sebelumnya. Sejak masa kampanye, retorika anti-Tiongkok yang diusung DPP menyebar luas dan menimbulkan kekhawatiran bahwa Taiwan akan semakin menjauh dari jalur reunifikasi nasional.

Alih-alih menggunakan invasi langsung yang beresiko menimbulkan konfrontasi terbuka dengan Amerika Serikat dan sekutunya, Tiongkok lebih memilih menggunakan strategi *greyzone*. Analisis Tiongkok memandang tindakan taktik *greyzone* sebagai langkah-langkah yang telah digunakan oleh negara-negara kuat baik secara historis maupun dalam beberapa dekade terakhir, yang berada di luar ranah diplomasi normal dan pendekatan tradisional lainnya dalam menjalankan politik kenegaraan, namun tetap di bawah ambang penggunaan langsung kekuatan militer untuk eskalasi atau konflik. Aktivitas Tiongkok di taktik *greyzone* mendukung tujuan utama kepemimpinan RRC dalam bidang domestik, ekonomi, kebijakan luar negeri, dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, yang oleh Tiongkok

dipandang sebagai wilayah prioritas Tiongkok. Aktivitas taktik *greyzone* menyeimbangkan antara upaya Tiongkok untuk menciptakan lingkungan eksternal yang lebih menguntungkan dengan mengubah status quo regional demi keuntungannya, dan keinginan untuk tetap berada di bawah ambang respons militer dari Amerika Serikat atau negara tetangga Tiongkok (RAND, 2020).

Walaupun para pakar Tiongkok jarang menggunakan istilah taktik *greyzone* untuk menjelaskan aktivitas serupa yang dilakukan negaranya, konsep “operasi militer selain perang” atau *Military Operations Other Than War* (MOOTW) dalam perspektif Tiongkok memberikan kerangka untuk memahami bagaimana militer digunakan dalam konteks tersebut (RAND, 2020). Dalam pandangan para analis Tiongkok, MOOTW yang bersifat koersif maupun konfrontatif terhadap aktor eksternal dikategorikan sebagai operasi pemeliharaan stabilitas, perlindungan hak, atau operasi keamanan dan penjagaan. Selain itu, Tiongkok menekankan bahwa pelaksanaan MOOTW idealnya tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga melibatkan aktor dan instrumen nonmiliter sebagai bagian dari strategi komprehensifnya.

Dari cara pandang tersebut, dapat dilihat bahwa Tiongkok cenderung lebih selektif dalam menerapkan taktik *greyzone* berprofil tinggi terhadap negara kuat, seperti Jepang dan India, dibandingkan dengan Vietnam atau Filipina. Meski begitu, intensitas penggunaan instrumen militer terus meningkat, tanpa indikasi bahwa kapabilitas militer yang berkembang atau perbaikan hubungan diplomatik akan menahan Tiongkok dari menegaskan klaim teritorialnya. Sebaliknya, semakin besar kekuatan militer, siber, ekonomi dan geopolitik Tiongkok, semakin kuat pula kemungkinan penggunaan taktik *greyzone* berbasis militer, khususnya di wilayah udara dan maritim (RAND, 2020).

Bagan ini menggambarkan variasi penggunaan taktik *greyzone* Tiongkok terhadap lima negara di Indo-Pasifik. Setiap batang grafik menunjukkan proporsi taktik militer, siber/operasi informasi, ekonomi, dan geopolitik yang digunakan Tiongkok. Melalui perbedaan proporsi instrumen tersebut, grafik ini menegaskan bahwa tingkat kekuatan dan posisi strategis negara sasaran berpengaruh langsung terhadap pilihan taktik Tiongkok.

Taiwan tampak sebagai negara yang paling banyak menghadapi tekanan, terlihat dari grafiknya yang menjulang jauh lebih tinggi dibanding negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok menggunakan hampir seluruh instrumen yang ada, mulai dari latihan militer, operasi siber, tekanan ekonomi, hingga manuver geopolitik di berbagai forum internasional. Komposisi ini tidak terlepas dari posisi Taiwan sebagai kepentingan utama Tiongkok, sehingga segala bentuk tekanan dilakukan secara simultan dan berlapis untuk mempertahankan klaimnya tanpa harus langsung memicu konflik terbuka.

Di bawah Taiwan, Vietnam dan Filipina menempati posisi menengah. Kedua negara ini terlibat sengketa maritim dengan Tiongkok sehingga taktik militer, terutama di wilayah laut dan udara, menonjol dalam interaksinya. Meski demikian, Tiongkok tidak hanya mengandalkan kekuatan militer; taktik ekonomi dan siber/IO juga terlihat cukup besar dalam grafik, menandakan bahwa tekanan terhadap kedua negara ini dilakukan secara menyeluruh, meski tidak seintens terhadap Taiwan. Pendekatan ini menggambarkan strategi Tiongkok dalam menekan negara-negara yang lebih kecil namun memiliki isu langsung dengan klaim teritorialnya.

Berbeda dengan ketiga negara sebelumnya, India dan Jepang menerima tekanan yang jauh lebih terbatas. Grafik keduanya lebih pendek, menandakan bahwa Tiongkok lebih hati-hati dalam menggunakan taktik *greyzone* terhadap negara yang memiliki kapabilitas militer besar dan posisi strategis penting di kawasan. Terhadap India, tekanan lebih banyak muncul di wilayah perbatasan darat, sementara terhadap Jepang, dinamika utamanya berada di sekitar Laut Cina Timur. Walaupun demikian, Tiongkok tetap menggunakan sejumlah taktik siber/IO dan ekonomi, tetapi skalanya jauh lebih terkendali dibanding negara-negara yang dianggap lebih rentan atau lebih kecil secara strategis.

Komposisi warna di setiap grafik, menunjukkan bahwa taktik militer merupakan komponen terbesar bagi hampir seluruh negara. Hal ini memperlihatkan bahwa kecenderungan Tiongkok untuk menggunakan unjuk kekuatan sebagai instrumen utama dalam strategi taktik *greyzone* nya. Di bawahnya, lapisan siber/IO dan ekonomi mengisi ruang signifikan, mencerminkan upaya Tiongkok melakukan penetrasi pengaruh tanpa harus mengandalkan kekuatan keras secara langsung. Taktik geopolitik melengkapi gambaran tersebut dengan membentuk narasi, jaringan, dan dukungan internasional yang diperlukan untuk menekan negara sasaran dari arah yang lebih halus.

Menurut pandangan Tiongkok, strategi taktik *greyzone* bukanlah bentuk agresi, melainkan respons rasional terhadap provokasi dan campur tangan pihak luar, khususnya yang berupaya melemahkan prinsip “Satu Tiongkok”. Penggunaan berbagai instrumen diantaranya diplomasi, ekonomi, dan militer berintensitas rendah dianggap bagian dari upaya komprehensif untuk menjaga stabilitas lintas selat dan mencegah separatisme Taiwan. Melalui pendekatan ini, Tiongkok berupaya memastikan agar seluruh aktor, termasuk Taiwan dan sekutunya, menghormati kedaulatan serta kepentingan strategis Tiongkok sesuai prinsip hukum internasional dan stabilitas regional (Tsu, 2022).

Berangkat dari kajian literatur yang relevan, penelitian ini disusun dengan memanfaatkan penelitian terdahulu sebagai pijakan konseptual dalam membahas strategi pertahanan Tiongkok melalui penggunaan taktik *greyzone* terhadap Taiwan. Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa Tiongkok secara konsisten memanfaatkan pendekatan taktik *greyzone* untuk memperkuat

kepentingan strategisnya tanpa memicu konflik bersenjata terbuka. Penelitian (Sarjito, 2024) menggambarkan bagaimana taktik *greyzone* diterapkan melalui milisi maritim, pembangunan pulau buatan, diplomasi koersif, dan perang informasi di Laut Cina Selatan dengan tujuan memperkuat klaim teritorial serta memperluas pengaruh regional, meskipun berdampak pada meningkatnya ketegangan dan memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat. Temuan ini sejalan dengan kajian (W. C. Chen et al., 2024) yang menyoroti penggunaan kapal penjaga pantai, milisi maritim, dan kapal nelayan sebagai instrumen klaim kedaulatan di berbagai kawasan maritim, yang secara nyata memengaruhi sektor perikanan negara-negara terdampak tanpa melewati ambang konflik bersenjata.

Dinamika serupa juga ditunjukkan oleh (Haryanto, 2025) melalui analisis bentrokan patroli maritim antara Tiongkok dan Filipina, di mana taktik paramiliter agresif, diplomasi, serta soft power dipadukan untuk mempertahankan posisi strategis Tiongkok, sementara negara sasaran merespons melalui penguatan kerja sama pertahanan dan jalur diplomasi multilateral. Perspektif ini diperkaya oleh (Goldrick, 2018) yang menekankan bahwa operasi *greyzone* di domain maritim sengaja dirancang berada di bawah ambang perang dengan memanfaatkan coast guard, milisi maritim, dan lawfare, sehingga menuntut respons terkoordinasi dan pengelolaan informasi yang cermat agar negara sasaran tidak kehilangan legitimasi internasional.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, literatur yang ada masih membahas strategi taktik *greyzone* Tiongkok secara general dan tersebar, dengan penekanan dominan pada domain maritim, seperti Laut Cina Selatan, maupun implikasinya terhadap sektor perikanan dan bentrokan patroli laut antarnegara. Keempat penelitian bahkan bersifat komparatif lintas negara atau lintas kawasan, sehingga tidak menggali secara mendalam dinamika satu arena strategis tertentu. Berbeda dengan penelitian terdahulu diatas, skripsi ini secara memusatkan perhatian pada Taiwan sebagai satu kawasan kunci yang memiliki signifikansi strategis tinggi dalam keamanan regional Tiongkok. Fokus penelitian tidak semata berhenti pada aktivitas maritim, tetapi menelaah secara lebih komprehensif bagaimana taktik *greyzone* digunakan secara terintegrasi dalam konteks strategi pertahanan Tiongkok terhadap Taiwan.

Untuk memahami konteks hubungan lintas selat, penelitian ini merujuk pada sejumlah kajian yang memberikan landasan historis dan konseptual. Kajian (Luo Qi, 2000) memetakan evolusi hubungan Tiongkok–Taiwan sejak periode konfrontasi militer hingga fase interaksi ekonomi dan politik yang lebih kompleks, sekaligus menunjukkan keterkaitannya dengan stabilitas keamanan regional. Analisis ini dilengkapi oleh (Webster, 2001) yang menguraikan berbagai kemungkinan masa depan hubungan lintas selat diantaranya reunifikasi, konflik militer, keberlanjutan status quo, serta menyoroti peran prinsip satu Tiongkok dan pengaruh Amerika Serikat dalam membentuk dinamika tersebut. Sementara itu, studi (Darmawan, 2024) mengenai reklamasi dan militerisasi pulau buatan di Kepulauan Spratly memperlihatkan pola perilaku strategis Tiongkok dalam memperluas kontrol wilayah melalui taktik *greyzone* di kawasan lain, yang relevan sebagai konteks pembandingan terhadap pendekatan Tiongkok di Taiwan. Dengan demikian, meskipun ketiga literatur tersebut relevan secara substansial, pembahasannya masih cenderung terpisah antara pendekatan historis, spekulatif, dan kawasan lain. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya kajian yang secara implisit menjembatani dinamika hubungan Tiongkok–Taiwan dengan pola strategi Tiongkok yang berkembang dalam konteks kontemporer tertentu.

Dalam kerangka pemahaman strategi Tiongkok, penelitian ini juga mengacu pada sejumlah kajian yang menyoroti dimensi militer, politik, dan ekonomi. (Sheng, 2002b) menjelaskan pergeseran fokus kebijakan luar negeri dan keamanan Tiongkok ke kawasan Asia Pasifik sebagai bagian dari strategi keamanan nasional yang semakin berorientasi regional. (Rajagopalan, 2008) menekankan proses modernisasi militer Tiongkok yang signifikan, ditandai dengan peralihan dari konsep perang rakyat menuju kekuatan militer modern berbasis teknologi, serta kesiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan Amerika Serikat dalam konteks Taiwan. Dimensi politik lintas selat dibahas oleh (G. Lin, 2016) melalui analisis strategi Beijing dalam menjalin keterlibatan dengan Kuomintang untuk mendorong reunifikasi, sekaligus menunjukkan perbedaan fundamental dengan posisi Partai Progresif Demokratik yang menegaskan kedaulatan Taiwan. Aspek ekonomi dilengkapi oleh (Tanner, 2018) yang menunjukkan bagaimana keterikatan

ekonomi dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan politik untuk memengaruhi elite dan pengambil kebijakan di Taiwan.

Meskipun kajian-kajian tersebut secara kolektif memperkaya pemahaman mengenai strategi Tiongkok, keempat kajian tersebut cenderung menempatkan masing-masing instrumen strategi secara terpisah sesuai dengan fokus analisisnya. Berangkat dari pijakan tersebut, skripsi ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan melihat strategi Tiongkok terhadap Taiwan sebagai satu rangkaian tindakan yang saling terkait dalam kerangka taktik *greyzone*. Dengan membatasi analisis pada periode 2016–2020, penelitian ini berupaya menangkap dinamika dan intensifikasi strategi Tiongkok secara lebih kontekstual dalam perkembangan hubungan lintas selat kontemporer.

1.2 Rumusan Masalah

Ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan meningkat tajam pada periode 2016–2020 seiring dengan semakin aktifnya Tiongkok menerapkan taktik *greyzone* sebagai bagian dari strategi pertahanannya terhadap Taiwan. Tiongkok berupaya mempertahankan kedaulatannya dan menegaskan prinsip “Satu Tiongkok” tanpa memicu perang terbuka. Strategi ini mencerminkan pendekatan pertahanan komprehensif yang menggabungkan instrumen militer, politik, dan ekonomi guna menjaga stabilitas kawasan serta menekan gerakan separatis di Taiwan. Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan utama: **Bagaimana strategi pertahanan Tiongkok melalui taktik *greyzone* terhadap Taiwan pada periode 2016–2020 di analisis melalui Realisme Ofensif?**

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis strategi Tiongkok dalam menerapkan taktik *greyzone* terhadap Taiwan pada periode 2016–2020, dengan fokus pada pola, instrumen, serta bentuk-bentuk tekanan non-konvensional yang digunakan dalam dinamika lintas selat. Periode penelitian 2016–2020 ditetapkan berdasarkan satu siklus penuh masa jabatan periode pertama Presiden Tsai Ing-wen. Rentang waktu empat tahun ini dipilih untuk membatasi analisis pada proses perancangan,

pengujian, dan eskalasi taktik *greyzone* Tiongkok, yang dilakukan sebagai respons langsung terhadap kebijakan pemerintahan Tsai pada periode tersebut.

Periode ini dipilih karena menandai transisi kekuasaan di Taiwan dari partai Kuomintang (KMT) yang cenderung pro-Beijing, ke partai Partai Demokratik Progresif (DPP) di bawah pimpinan Tsai Ing-wen. Berbeda dengan pendahulunya, Tsai menolak untuk secara eksplisit mengakui Konsensus 1992 yang berkaitan dengan Kebijakan “Satu Tiongkok”. Hal ini mendorong Tiongkok meningkatkan tekanan untuk menghalangi segala upaya kemerdekaan demi menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah nasional Tiongkok (Lin, 2016).

Penelitian ini tidak berorientasi pada penilaian keberhasilan, kegagalan, ataupun dampak akhir dari strategi tersebut terhadap posisi Taiwan maupun stabilitas kawasan. Kajian difokuskan pada proses dan karakteristik penerapan taktik *greyzone* itu sendiri, yakni bagaimana strategi tersebut dirancang, dijalankan, dan diposisikan sebagai instrumen utama dalam kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan, sehingga batasan masalah penelitian tetap terjaga pada analisis strategi, bukan pada evaluasi hasil kebijakan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah strategis yang ditempuh Tiongkok dalam menerapkan taktik *greyzone* terhadap Taiwan pada periode 2016–2020, melalui instrumen militer, politik, dan ekonomi sebagai bagian dari strategi nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan memperluas pengaruhnya di kawasan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

a. Manfaat Akademik: Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami strategi Tiongkok melalui taktik *greyzone* terhadap Taiwan, serta menjadi referensi bagi studi mengenai keamanan dan politik kawasan Asia Timur.

b. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagi pembuat kebijakan dan pengamat internasional mengenai penerapan taktik *greyzone* Tiongkok pada periode 2016–2020, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan tentang keamanan Indo-Pasifik.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang yang menggambarkan meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan pada periode 2016–2020 sebagai dampak dari penerapan taktik *greyzone* oleh Tiongkok, yakni strategi pertahanan non-konvensional yang memadukan instrumen militer, siber, ekonomi dan geopolitik untuk menekan Taiwan tanpa memicu konflik bersenjata langsung. Bab ini juga menguraikan bagaimana Tiongkok menggunakan pendekatan tersebut sebagai bagian dari strategi pertahanannya dalam menjaga kedaulatan dan memperluas pengaruh regional. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi landasan dalam penyusunan dan arah analisis penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dan konsep Realisme Ofensif dalam menganalisis bagaimana strategi pertahanan Tiongkok melalui taktik *greyzone* terhadap Taiwan. Kerangka pemikiran penelitian ini disusun dalam bentuk bagan.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah, meliputi pendekatan, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

Bab IV Evolusi Hubungan Beijing dan Taipei di Era Modern

Bab ini membahas evolusi hubungan Beijing dan Taipei sejak perang saudara hingga munculnya sikap tegas Tiongkok terhadap Taiwan setelah

terpilihnya Tsai Ing Wen pada Pemilihan Presiden Taiwan 2016. Evolusi hubungan ini menjadi acuan bagaimana Tiongkok memandang Taiwan sebagai ancaman kedaulatannya.

Bab V Taktik Taktik *Greyzone* Tiongkok Terhadap Taiwan

Bab ini membahas penerapan konsep realisme ofensif dalam kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan pada periode 2016–2020, dengan menyoroti bagaimana Beijing memadukan taktik *greyzone* untuk mempertahankan kedaulatannya.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat rangkuman hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Peneliti menyimpulkan temuan utama terkait strategi Taiwan dalam menghadapi taktik *greyzone* Tiongkok serta implikasinya terhadap keamanan kawasan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pembaca maupun penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

Bagian ini memuat daftar referensi yang dijadikan acuan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini.